



# Bansos BBM Cair Pekan Ini

## NAIK TURUN HARGA BBM DI ERA JOKOWI

Pemerintah secara resmi menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai Sabtu (3/9). Dengan adanya penyesuaian harga, harga Pertalite kini menjadi Rp10.000 dari yang sebelumnya Rp7.650 per liter, sedangkan harga Solar dari yang semula Rp5.150 naik menjadi Rp6.800. Adapun, harga Pertamina nonsubsidi menjadi Rp14.500 dari yang sebelumnya Rp12.500 per liter. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, kenaikan harga BBM tidak hanya kali ini saja.

**JOGJA—Bantuan sosial (Bansos) sebagai kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar cair pekan ini di DIY.**

*Yosef Leon, Lugas Subarkah, &  
Anisatul Umah  
[redaksi@harianjogja.com](mailto:redaksi@harianjogja.com)*

Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM per Sabtu (3/9), namun hingga Minggu (4/9), bantuan sebagai bantalan ekonomi bagi warga kurang mampu atas adanya kenaikan harga

ini, belum diterima warga di Bumi Mataram lantaran masih proses pencocokan data. Bansos BBM paling cepat akan dicairkan pekan ini.

Di Sleman, pencairan Bansos dilakukan pada 6 September 2022, besok. "Untuk rencana penyaluran di Sleman menurut informasi dari PT Pos akan dimulai Selasa tanggal 6 [6 September 2022]," ucap Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Dinsos Sleman, Feri Istanto, Minggu.

► Halaman 10

► Dinsosnakertrans Kota Jogja belum menerima data keluarga penerima manfaat yang berhak memperoleh bansos.

► Data penerima bansos BBM masih dicek ulang oleh Pusat untuk memastikan penerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

### Bansos BBM...

Sejauh ini Dinsos Sleman belum menerima data pasti berapa total penerima manfaat bansos BBM. Dia menjelaskan mengenai data penerima nantinya akan masuk ke PT Pos.

Sebagai gambaran Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 di Sleman sebelumnya menasar 39.426 penerima manfaat.

Sedangkan penerima bansos reguler sembako atau Program Keluarga Harapan (PKH) ada 83.921. "Kami belum tahu, penerima BLT [Bantuan Langsung Tunai] BBM ini penerima bansos reguler atau bansos khusus Covid-19," jelasnya.

Kepala Dinsos Sleman, Eko Suhargono mengatakan data sementara berdasarkan koordinasi dengan PT Pos Kantor Besar Jogja jumlah penerima sekitar 97.000-an. "Masih sementara [datanya] saya koordinasi Sabtu kemarin dengan PT Pos Kantor Besar masih 87.000-an," ucapnya. Satgas BLT BBM Kantor Pos Bantul, Anwar Harsono, menjelaskan Kantor Pos Bantul telah mengantongi data penerima BLT BBM yang akan mulai disalurkan pekan ini. "Kami menunggu kesiapan dan koordinasi. Kemungkinan besar pekan depan," ujarnya.

Bansos BBM ini akan disalurkan melalui kantor pos kecamatan atau kapanewon dalam bentuk tunai, untuk kemudian diambil setiap penerima. Adapun besaran uang yang diberikan yakni Rp300.000 untuk hitungan dua bulan. "Di kapanewon, biar dekat sama masyarakat," Kantor Pos Bantul hanya menyalurkan BLT BBM untuk 12 kapanewon. Penerima yang tinggal di lima kecamatan lainnya meliputi Sewon, Sedayu, Piyungan, Banguntapan, dan Kasihan, akan mendapat bantuan melalui Kantor Pos Kota Jogja.

Jumlah penerima BLT BBM lewat Kantor Pos Bantul sebanyak 43.913 keluarga. Ia tidak mengetahui apakah penerima itu juga sama dengan penerima bantuan untuk Covid-19. "Kalau dari jumlahnya beda, yang Covid itu terakhir sembako jumlahnya 126.000," kata dia. Kepala Dinas Sosial Bantul, Gunawan Budi Santosa, mengatakan saat ini ia belum mendapatkan data penerima BLT BBM tersebut. Ia juga belum mendapat arahan terkait waktu penyaluran. "By name by adress kami belum

menerima. Penyalurannya kami juga belum diinfo."

Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosakertrans) Kota Jogja, Supriyanto, mengatakan instansinya belum menerima data keluarga penerima manfaat (KPM) yang berhak memperoleh bansos BBM di wilayahnya.

Koordinasi dengan penyalur baru akan dilaksanakan hari ini, Senin (5/9). "Bansos BBM kan akan disalurkan lewat pos, kami baru diundang rapatnya besok Senin [hari ini]. Jadi kami belum tahu persis mekanismenya seperti apa, termasuk jumlah penerima," katanya, Minggu.

Supriyanto menerangkan data tentang nama dan alamat KPM yang berhak menerima juga sepenuhnya berada di pihak ketiga yakni PT Pos selaku penyalur bantuan. Namun, ia memastikan bahwa penyaluran nantinya dilangsungkan secara bertahap. "Pengalaman begini, penyaluran bansos sembako itu yang awal tahun lalu kan diseleenggarakan bertahap. Jadi pasti nanti yang bansos BBM ini juga demikian," kata dia.

Sebelumnya, Executive General Manager Kantor Cabang Utama Pos Jogja, Fahdian Hasibuan, menyebut belum menerima data penerima bansos BBM di DIY dari Kemensos.

Hanya saja koordinasi dan komunikasi telah dilakukan dengan pemkab/pemkot tiap wilayah. Sehingga sewaktu-waktu penyaluran bisa dilaksanakan.

Menurutnya, data penerima bansos BBM masih dicek ulang oleh Pemerintah untuk memastikan penerima tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

### Tarif Angkutan

Organda DIY memastikan bakal ada penyesuaian tarif di sektor transportasi seiring naiknya harga BBM jenis Solar dan Pertalite. Organda yang membawahi layanan bus AKAP, AKDP, barang, wisata dan taksi ini menyebut kenaikan tarif nantinya berkisar 18%-22%.

Ketua Organda DIY, Hantoro mengatakan kenaikan harga tarif atau layanan menjadi sebuah keniscayaan sebagai dampak langsung dari kenaikan harga BBM. "Karena kami sudah tidak bisa menawar lagi, ya diterima saja. Dan kami akan berusaha menyesuaikan tarif."

Ia menyebut kenaikan harga BBM yang mencapai 30% mau tidak mau membuat pengusaha transportasi putar otak. Kedua jenis BBM yang naik yakni Pertalite dan Solar merupakan bahan bakar pilihan utama para pelaku transportasi. Layanan angkutan perdesaan (angkudes) dan taksi mayoritas menggunakan Pertalite, sedangkan angkutan barang atau wisata menggunakan Solar. "Kenaikan mungkin di sekitar 18-22 persen di semua layanan. Kurang lebih seperti itu," ujarnya.

Organda meminta konsumen bisa memahami penyesuaian tarif ini. Menurutny, hal itu juga merupakan pilihan yang sulit bagi pengusaha transportasi. Jika tarif tidak disesuaikan pengusaha takut merugi.

### Lonjakan Harga

Sementara itu, lonjakan harga pangan dan berbagai kebutuhan lainnya, hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK, berisiko terjadi setelah kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat, mengatakan kenaikan harga BBM segera disusul oleh naiknya harga berbagai kebutuhan lain. Kenaikan harga pangan dinilai paling berisiko karena akan menjadi beban besar bagi masyarakat. "Kenaikan [harga] BBM ini akan berdampak pada kenaikan harga berbagai bahan pangan dan kebutuhan masyarakat lainnya. Dan masyarakat saat ini tidak siap dengan berbagai kenaikan tersebut," ujar Achmad.

Ia menilai kenaikan harga BBM berisiko menyebabkan staglasi; sebagai rambatan efek dari kenaikan berbagai harga. Bahkan, Achmad mengkhawatirkan terjadinya PHK besar-besaran.

Staglasi adalah fenomena yang terjadi ketika pertumbuhan ekonomi lambat dan statis yang relatif tinggi atau stagnasi ekonomi yang disertai kenaikan harga.

"Pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini."

Achmad mengibaratkan masyarakat sudah jatuh tertimpa tangga. Belum usai derita akibat pandemi Covid-19, kini masyarakat menghadapi kenaikan harga BBM dan risiko lonjakan harga berbagai kebutuhan. (LNB/NL/Angegal)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1.       | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 21 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005